

LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG
TAHUN 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Magelang, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAGELANG



Drs. AGUS SATTYO HARIYADI, M.Si

NIP. 196701311997031004

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	49
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	
DPA	
DPPA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	16
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2022	19
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022	20
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022	28
Tabel 2.7	Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021	29
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	31
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022	32
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	33
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain	36

Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	37
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	39
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	50
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	54
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

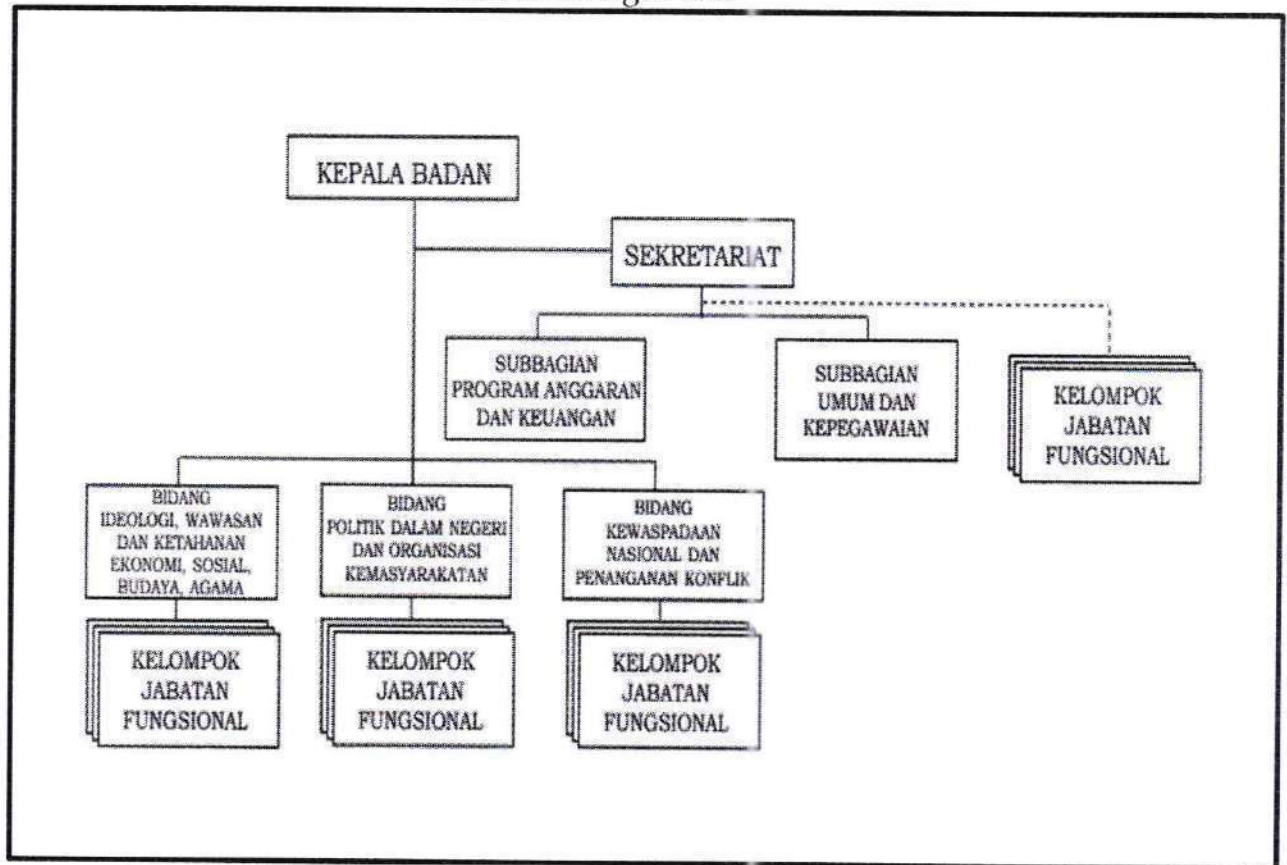
- pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan

Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjaga iklim sejuk dan kondusif, aman, tertib dan damai serta harmonisasi hubungan antar pemeluk agama.
2. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas daerah.
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba & obat-obatan terlarang.
5. Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan damai.
6. Pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Menjaga iklim sejuk dan kondusif, aman, tertib dan damai serta harmonisasi hubungan antar pemeluk agama.
2. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas daerah.
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras.
5. Pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/074/112 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/074/112 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang.

Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah:

"Magelang Maju, Sehat dan Bahagia"

Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah:

1. Magelang

Magelang adalah satu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah $\pm 18,54$ km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

2. Maju

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan

ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

3. Sehat

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.

Sebagai **kota sehat**, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.

Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Bahagia

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq :**

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2) Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif:

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang **maju**. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu **pemanfaatan TIK** menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah

memadukan antara kecerdasan manusia (*human intelligence*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. **Kepastian menjadi kata kunci**, yaitu kepastian yang terkait **waktu** lamanya proses perizinan, kepastian terkait **besaran biaya** yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan **kemudahan**. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih **bahagia**. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

5) Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai **kota yang lebih maju**. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni

kota. **Lingkungan permukiman yang sehat** akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Didalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya **pertukaran informasi secara masal**.

Kinerja penataan ruang akan menjadi 'panglima' dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk memwadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebanyak 2 tujuan dan 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya stabilitas daerah			Persentase Penurunan Gangguan	—	2%	2%	2%	2%	2%
		1.1	Menurunnya Potensi Gangguan	Jumlah Konflik	—	0	0	0	0	0
				Angka kriminalitas	—	10,15	10,00	9,84	9,69	9,53
				Persentase kriminalitas yang tertangani	—	80,5%	81%	81,50%	82%	82,50%
				Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	—	0	0	0	0	0
				Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	—	0	0	0	0	0
				Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	—	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik Pilpres	—	0	0	80	0	0
				Angka partisipasi Politik pilgub	—	0	0	80	0	0
				Angka partisipasi Politik pilwalkot	—	0	0	80	0	0

				Angka partisipasi Politik pileg	—	0	0	85	0	0
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	—	BB	BB	AA	AA	AA

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Stailitas Daerah	Persentase Penurunan Gangguan	2,00%	--	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Th n} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$	Data kriminalitas di Kepolisian dan Data Konflik di Bakesbangpol Kota Magelang
2	Menurunnya Jumlah Kriminalitas	Jumlah Konflik	0	--	Jumlah Potensi Konflik pada tahun N	Data kriminalitas di Kepolisian Kota Magelang
3	Meningkatnya penanganan kriminalitas	Angka Kriminalitas	10,15	--	$\frac{\text{Jumlah Kejahatan dalam 1 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk tahun ybs}} \times 10.000$	Data kriminalitas di Kepolisian Kota Magelang
		Persentase Kriminalitas yang tertangani	80,5%	--	$\frac{\text{Jumlah kriminalitas yang tertangani tahun-n}}{\text{Total kriminalitas tahun-n}} \times 100\%$	Data kriminalitas di Kepolisian Kota Magelang
4	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik (Pilpres)	-	--	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah pemilih terdaftar}} \times 100\%$	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
		Angka partisipasi Politik (Pilgub)	-	--	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah pemilih terdaftar}} \times 100\%$	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
		Angka partisipasi Politik (Pilwalkot)	-	--	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah pemilih terdaftar}} \times 100\%$	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
		Angka partisipasi Politik (Pileg)	-	--	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah pemilih terdaftar}} \times 100\%$	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai Sakip OPD	BB	--	Nilai Sakip OPD	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya stabilitas daerah		Persentase Penurunan Gangguan	Angka	2%
		1.1 Menurunnya Potensi Gangguan	Jumlah Konflik	Angka	0
			Angka kriminalitas	Angka	10,1 5
			Persentase kriminalitas yang tertangani	Persentase	80. 5%
			Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Angka	0
			Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Angka	0
			Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Persentase	100%
		1.2 Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik Pilpres	Persentase	0
			Angka partisipasi Politik pilgub	Persentase	0
			Angka partisipasi Politik pilwalkot	Persentase	0

				Angka partisipasi Politik pileg	Angka	0
		1.3	Meningkat akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	Angka	BB

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 02 bulan 01 tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota
Magelang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Jumlah Konflik	0
		Angka Kriminalitas	10,15
		Persentase Kriminalitas yang tertangani	80,5%
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Persentase Penurunan Gangguan	2,0%
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik (Pilpres)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilgub)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilwalkot)	0
		Angka partisipasi Politik (Pileg)	0
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	72-75

Program (5)

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Anggaran (6) Rp 215.287.000
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp 950.256.000
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp 114.590.000
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp 319.153.000
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp 350.133.000
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.387.873.000

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya dokumen pengelolaan dan pelaporan kinerja keuangan sesuai aturan	100 %	4.387.873.00
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	65.203.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 Dokumen	52.920.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA -SKPD	1 Dokumen	1.500.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.350.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.900.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.830.000

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.703.000
			20 Laporan	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan</i>	100%	3.750.126.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	18 Orang	3.739.348.000
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun	12 Dokumen	9.378.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD	3 Dokumen	1.400.000
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan laporan administrasi umum PD</i>	100%	170.123.000
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan	18 Ruang	2.222.000
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	18 Orang	15.385.000
		Jumlah Genset yang disediakan BBM	1 Unit	
		Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg	6 Tabung	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	6 Jenis	8.746.000

		Jumlah Dokumen yang digandakan	19.392 Lembar	
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	2 jenis	3.000.000
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	25.540.000
		Jumlah alat dan bahan pembersih	33 Jenis	
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Kali	6.480.000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	108.750.000
		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	54 Kali	
1.4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	195.120.000
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	800 Dokumen	9.560.000
		Jumlah alat tulis kantor yg disediakan	37 Jenis	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan	4 Jenis	44.400.000
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	7 Orang	141.160.000
1.5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	207.301.000

1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11 Unit	150.485.000
		Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	11 Unit	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	3 Unit	37.916.000
		Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	3 Unit	
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	18.900.000
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik SARA	0 Kasus	215.287.000
2.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan</i>	100%	215.287.000
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara	6 Kegiatan	98.742.000
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi FKUB (Kegiatan)	12 Kegiatan	114.530.000

2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	4 Laporan	2.015.000
3	POGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	0,69%	950.256.000
3.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Cakupan pemberdayaan Parpol</i>	100%	950.256.000
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Politik	1 Kegiatan	371.132.000
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Media Penyebaran Pendidikan Politik	2	579.124.000

		Jumlah Monev (Penyerahan Hibah dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada)	1	
		Hibah Banpol	1	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan dipantau	16,26 %	114.590.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	82,11 %	
4.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas</i>	100%	114.590.000
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina	1 Kegiatan	80.000.000
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monev	1	34.590.000
		Jumlah fasilitasi ormas	3	
		update Database Ormas	1	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3,57%	319.153.000
5.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	100%	319.153.000

5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	1 Kampung	34.787.000
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN	4 Lokasi	68.387.000
		Jumlah Peserta sosialisasi	300 Orang	
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12	154.434.000
5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	1	61.545.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	0	350.133.000
6.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100	350.133.000

6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)	365	19.995.000
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitasi FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	12	171.090.000
6.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	12	159.048.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Magelang Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Jumlah Konflik	0
		Angka Kriminalitas	10,15
		Persentase Kriminalitas yang tertangani	80,5%
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Persentase Penurunan Gangguan	2,0%
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik (Pilpres)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilgub)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilwalkot)	0
		Angka partisipasi Politik (Pileg)	0
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	72-75

Program (5)

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran (6)

Rp 617.928.000

Rp 1.218.086.000

Rp 291.905.000

Rp 354.153.000

Rp 386.256.000

Rp. 4.111.090.323

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya dokumen pengelolaan dan pelaporan kinerja keuangan sesuai aturan	100 %	4.111.090.323
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	77.203.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 Dokumen	64.920.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA -SKPD	1 Dokumen	1.500.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.350.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.900.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.830.000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.703.000
			20 Laporan	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan</i>	100%	3.339.610.320
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	18 Orang	3.328.832.320
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun	12 Dokumen	9.378.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD	3 Dokumen	1.400.000
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan laporan administrasi umum PD</i>	100%	184.324.000

1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan	18 Ruang	2.222.000
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	18 Orang	15.385.000
		Jumlah Genset yang disediakan BBM	1 Unit	
		Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg	6 Tabung	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	6 Jenis	8.746.000
		Jumlah Dokumen yang digandakan	19.392 Lembar	
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	2 jenis	4.800.000
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	25.540.000
		Jumlah alat dan bahan pembersih	33 Jenis	
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Kali	6.480.000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	121.151.000
		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	54 Kali	
14.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah</i>	100%	75.240.000
14.1	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan meja kursi Pejabat	1 Unit	8.650.000
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	3 Jenis	66.590.000
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	223.232.003
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	800 Dokumen	9.560.000
		Jumlah alat tulis kantor yg disediakan	37 Jenis	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan	4 Jenis	44.400.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	7 Orang	169.272.003
1.5.4	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	211.481.000

1.5.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11 Unit	150.485.000
		Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	11 Unit	
1.5.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	3 Unit	37.916.000
		Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	3 Unit	
1.5.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	23.080.000
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik SARA	0 Kasus	617.928.000
2.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase Fasilitas Peningkatan Wawasan Kebangsaan</i>	100%	617.928.000
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara	6 Kegiatan	501.383.000
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12 Kegiatan	114.530.000
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	4 Laporan	2.015.000
3	POGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	0,69%	1.218.086.000

3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan pemberdayaan Parpol	100%	1.218.086.000
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Politik	1 Kegiatan	552.346.000
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Media Penyebaran Pendidikan Politik	2	654.770.000
			1	
			1	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan dipantau	16, 26 %	291.905.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	82, 11 %	
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas	100%	291.905.000
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina	1 Kegiatan	174.800.000
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Money	1	117.105.000

		Jumlah fasilitasi ormas	3	
		update Database Ormas	1	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3,5 7%	354.153.000
5.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	100%	354.153.000
5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	1 Kampung	34.787.000
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN	4 Lokasi	68.387.000
		Jumlah Peserta sosialisasi	300 Orang	
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi FKUB (Kegiatan)	12	154.434.000
5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	1	96.545.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	0	386.256.000
6.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan</i>	<i>Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100	386.256.000

	<i>Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>			
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)	365	19.995.000
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitasi FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	12	175.271.000
6.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	12	190.990.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	< 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Terwujudnya Stailitas Daerah	Persentase Penurunan Gangguan	2,00%	1,43%	139.86%	Sangat Tinggi	Data kriminalitas di Kepolisian dan Data Konflik di Bakesbangpol Kota Magelang
2	Menurunnya Jumlah Kriminalitas	Jumlah Konflik	0	0	100%	Sangat Tinggi	Data kriminalitas di Kepolisian Kota Magelang
3	Meningkatnya penanganan kriminalitas	Angka Kriminalitas	10,15	5,94	170.87%	Sangat Tinggi	Data kriminalitas di Kepolisian Kota Magelang

		Persentase Kriminalitas yang tertangani	80,5%	82,89	102,97%	Sangat Tinggi	Data kriminalitas di Kepolisian Kota Magelang
4	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik (Pilpres	-	-	-	-	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
		Angka partisipasi Politik (Pilgub)	-	-	-	-	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
		Angka partisipasi Politik (Pilwalkot)	-	-	-	-	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
		Angka partisipasi Politik (Pileg)	-	-	-	-	Data pemilih dari KPU dan CAPIL Kota Magelang
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai Sakip OPD	72-75	77,15	100%	Sangat Tinggi	--

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas bahwa Capaian Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah. Keberhasilan itu ditandai dengan capaian kinerja yang capaiannya mencapai 100 % dan bahkan beberapa indikator melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian melebihi 100%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya stabilitas daerah	Persentase Penurunan Gangguan	--	--	--	2%	1,43%	139.86 %
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Jumlah Konflik	0	0	100%	0	0	100%
		Angka kriminalitas	--	--	--	10,1 5	5,94	170.87 %

		Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	99.30%	124.13%	80.5%	82.89	102.97%
		Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0	0	100%	0	0	100%
		Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0	0	100%	0	0	100%
		Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	0	0	100%	0	0	100%
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik Pilpres	0	0	0	0	0	0
		Angka partisipasi Politik pilgub	0	0	0	0	0	0
		Angka partisipasi Politik pilwalkot	0	0	0	0	0	0
		Angka partisipasi Politik pileg	0	0	0	0	0	0
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	70.00	70.23	100%	75	77.15	102.86%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang terdapat perbedaan Target maupun capaian kinerja. Hal tersebut karena dasar dari capaian kinerjanya juga berbeda. Untuk target dan capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan pada Renstra 2016-2021 sedangkan untuk Target dan capaian 2022 berdasarkan pada Renstra 2021-2026.

Realisasi Kinerja yang tahun 2022 yang tidak menjadi Target dan capaian tahun 2021 antara lain yaitu Presentase penurunan gangguan capaiannya cukup baik yaitu 1.43% dari Target 2% dimana semakin rendah realisasinya maka

capainnya semakin tinggi dalam hal ini capaian dari indikator Presentase Penurunan gangguan adalah 139.86%.

Untuk Presentase kriminalitas yang tertangani yang menjadi target pada tahun 2021 maupun 2022, capaiannya menurun dari tahun 2021 namun masih diatas target tahun 2022 yaitu dengan target 80.5 capainnya 82.89% dan tingkat capaian 102.97%.

Untuk angka partisipasi politik tahun 2021 maupun 2022 target maupun capaiannya adalah 0. Penilaian Sakip OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang mengalami kenaikan dari Nilai 70.23 menjadi 77.15.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya stabilitas daerah	Persentase Penurunan Gangguan	1,43%	2%	71.5%
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Jumlah Konflik	0	0	100%
		Angka kriminalitas	5,94	9,53	62.33%
		Persentase kriminalitas yang tertangani	82.89	82,50%	100.47%
		Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0	0	0%
		Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0	0	0%
		Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	0	0	0%
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik Pilpres	0	80	0%

		Angka partisipasi Politik pilgub	0	80	0%
		Angka partisipasi Politik pilwalkot	0	80	0%
		Angka partisipasi Politik pileg	0	85	0%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	77.15	80	96.43%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan Tahun 2026 tingkat kemajuan indikator adalah sangat baik bisa dilihat dari indikator antara lain adalah indikator Presentase Penurunan Gangguan 71,5%, Jumlah Konflik 100%, Angka Kriminalitas 62,33% dan Presentase Kriminalitas yang tertangani 100.47%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$

*) Bakesbang tidak mempunyai perbandingan dengan standart Nasional

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya stabilitas daerah	Persentase Penurunan Gangguan	2%	1,43%	139.86%	Adanya Tim Kominda, Tim Terpadu penanganan konflik sosial yang memudahkan koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah.	--
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Jumlah Konflik	0	0	100%	Rutin dilaksanakan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga tumbuh toleransi di masyarakat.	--
		Angka kriminalitas	10,1 5	5,94	170.87%	Dilaksanakannya operasi pekat untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.	--
		Persentase kriminalitas yang tertangani	80. 5%	82.89	102.97%	Koordinasi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.	--
		Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0	0	100%	--	--
		Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0	0	100%	--	--
		Proporsi korban kekerasan dalam 12	0	0	100%	--	--

		bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi					
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik Pilpres	0	0	0	--	--
		Angka partisipasi Politik pilgub	0	0	0	--	--
		Angka partisipasi Politik pilwalkot	0	0	0	--	--
		Angka partisipasi Politik pileg	0	0	0	--	--
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	75	77.15	102.86%	Peran dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk meningkatkan performance manajemen sehingga pengukuran kinerja bisa valid, efisien dan akuntabel	--

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan table Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan solusi ada beberapa factor pendorong keberhasilan pencapaian suatu indikator seperti indikator pada Persentase Penurunan Gangguan dengan target 2,00% sementara capaiannya adalah 1,43% jika dibandingkan dengan target capaian dari indikator tersebut adalah 139.86%, hal tersebut bisa terwujud karena Adanya Tim Kominda, Tim Terpadu penanganan konflik sosial yang memudahkan koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah. Indikator Jumlah Konflik tingkat capaian kinerjanya 100% hal ini didorong dari Sosialisasi yang rutin dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila pada masyarakat, sehingga tumbuh toleransi di masyarakat. Indikator dari Angka kriminalitas dan Persentase kriminalitas yang tertangani tingkat capaian indikatornya melebihi 100% karena didorong oleh Koordinasi antar instansi dalam

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dilaksanakannya operasi pekat untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Terwujudnya stabilitas daerah	Persentase Penurunan Gangguan	139.86	—	—	—	—
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Jumlah Konflik	100%	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Konflik SARA	100	Menunjang
		Angka kriminalitas	170.87	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Persentase Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100	
		Persentase kriminalitas yang tertangani	102.22	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara (Kegiatan)	100	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Jumlah Fasilitasi FPBI (Kegiatan)	100	

				dan Sejarah Kebangsaan			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	100	
				PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN	Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang dibina dan dipantau	104.06	Menunjang
					Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang Aktif	98.26	
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas	100	
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina (Kegiatan)	100	
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monev	100	

				dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
					Jumlah fasilitasi ormas	100	
					update Database Ormas	100	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100.56	Menunjang
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	100	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN	100	

					Jumlah Peserta sosialisasi	100	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi FKUB (Kegiatan)	100	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	100	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KULAITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	100	Menunjang
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	100	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas	100	

				Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	daerah (Kegiatan)		
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	100	
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor dan fasilitas Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	100	
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik	--	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang berpartisipasi dalam Agenda Politik	142.03	Menunjang
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan</i>	Cakupan pemberdayaan Parpol	100	

				<i>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>			
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Politik (Kegiatan)	100	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Media Penyebaran Pendidikan Politik	100	
4	Meningkat nya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan	100	Menunjang

					dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (laporan)	100	
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan	100	

					tunjangan dalam 1 tahun		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD	100	
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan laporan administrasi umum PD	100	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	100	
					Jumlah Genset yang disediakan BBM	100	
					Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	100	
					Jumlah Dokumen yang digandakan	105.47	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	100	
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100	
					Jumlah alat dan bahan pembersih	93.94	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	100	

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	120	
					Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	59.26	
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah</i>	100	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	100	
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/ dokumen yang dikirim	144.37	
					Jumlah alat tulis kantor yg disediakan	97.29	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	100	
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendara	100	

				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	an dinas jabatan yang dipelihara		
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	100	
					Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	100	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Capaian dari Indikator Kinerja **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** adalah 142.03% , untuk Indikator Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah 100% meskipun dalam pelaksanaannya kegiatan dilakukan secara Daring/ Online sesuai Juknis dari Pusat, mengingat masih dalam masa pandemi namun kegiatan tetap terlaksana dengan baik, kegiatan kegiatan yang dilakukan secara Daring/ Online antara lain adalah Kegiatan Upacara Hari Lahir Pancasila, Upacara Hari Pahlawan dan Upacara Bela Negara yang dalam perencanaannya dilaksanakan Kegiatan Upacara diganti dengan Apel Pagi.

Capaian Indikator Program **Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** 104.06%, dan untuk indikator program Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

yaitu 98.26%, meskipun demikian capaian Program masih dalam kategori sangat baik. Indikator dari Kegiatan maupun sub kegiatan adalah 100%.

Capaian Indikator Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 100.56%. untuk capaian indikator kegiatan dan sub kegiatannya adalah 100%

Capaian Indikator Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial adalah 100% sedangkan untuk Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan tercapai 100%.

Dari uraian diatas bisa dievaluasi bahwa Pelaksanaan **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** mendukung sasaran Menurunnya Potensi Gangguan.

Capaian indikator dari Pogram Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tercapai 142.03% Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah 100% Pelaksanaan Program dan Kegiatan sangat mendukung terhadap sasaran meningkatkan akuntabilitas bantuan keuangan parpol

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjang Meningkat nya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan dibuktikan dengan meningkatnya Nilai Sakib menjadi 77.15.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.111.090.323	3.856.375.767	100 %
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	77.203.000	67,142,286	100 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.920.000	55.003.286	100 %
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1,491,000	100 %
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000	1,350,000	100 %
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.900.000	1,880,000	100 %
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.000	1,812,000	100 %
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.703.000	5,606,000	100 %
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.339.610.320	3.139.127.630	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.328.832.320	3.128.421.130	100%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.378.000	9.346.500	100%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	1.360.000	100%
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	184.324.000	172.101.539	100%
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.222.000	2.222.000	100%
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.385.000	14.612.000	100%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.746.000	8.716.000	100%
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.020.000	100%
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	25.540.000	24.994.500	96.97%

1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.480.000	6.058.000	100%
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.151.000	111.479.039	89.63%
14.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	75.240.000	75.240.000	100%
14.1	Pengadaan Mebel	8.650.000	8.650.000	100%
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.590.000	66.590.000	100%
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	223.232.003	212.905.402	100%
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.560.000	9.381.000	120.83%
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	35.178.748	100%
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.272.003	168.345.654	100%
1.5.4	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	211.481.000	189.858.910	100%
1.5.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.485.000	136.384.660	100%
1.5.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.916.000	30.493.250	100%
1.5.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.080.000	22.981.000	100%
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	617.928.000	453.006.250	100%
2.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	617.928.000	453.006.250	100%
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	501.383.000	362.652.000	100%
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	114.530.000	88.348.250	100%
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.015.000	2.006.000	100%
3	POGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	1.218.086.000	1.142.401.950	142,03%

	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
3.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	1.218.086.000	1.142.401.950	100%
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	552.346.000	487.631.950	100%
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	665.740.000	654.770.000	100%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	291.905.000	289.934.990	101.125%
4.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	291.905.000	289.934.990	100%
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	174.800.000	174.800.000	100%
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	117.105.000	115.134.990	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	354.153.000	309.408.500	100.56%
5.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	354.153.000	309.408.500	100%

5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34.787.000	33.751.500	100%
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	68.387.000	64.219.000	100%
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	154.434.000	138.919.000	100%
5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	96.545.000	72.519.000	100%
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	386.256.000	325.304.000	100%
6.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	386.256.000	325.304.000	100%
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.995.000	12.450.000	100%
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	175.271.000	17.1842.000	100%
6.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	190.990.000	141.012.000	100%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya stabilitas daerah	2%	1,43%	139.86%	6.979.418.323	6.376.431.457	91,36%	1.53%
2	Menurunnya Potensi Gangguan	0	0	100%	1.650.242.000	1.377.653.740	83,48%	1.20%
		10,1 5	5,94	170.87%	1.650.242.000	1.377.653.740	83,48%	2.05%
		80. 5 %	82.89	102.97%	1.650.242.000	1.377.653.740	83,48%	1.23%
		0	0	100%	—	—	--	
		0	0	100%	—	—	--	
		0	0	100%	—	—	--	
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	0.69	0.98	142,03%	1.218.086.000	1.142.401.950	94%	1.51%
		0	0	0	—	—	--	
		0	0	0	—	—	--	
		0	0	0	—	—	--	
4	Meningkat nya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan	75	77.15	103%	4.111.090.323	3.856.375.767	94%	1.10%

Uraian penjelasan tabel :

Dari table Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah efisien dengan tingkat efisien diatas angka 1 untuk mendukung Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 %	100 %	100 %	4.111.090.323	3.856.375.767	93,80%	1.07
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	100 %	77.203.000	67,142,286	86.97%	1.15
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	64.920.000	55.003.286	84,72%	1.18
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1.500.000	1,491,000	99,40%	1,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1.350.000	1,350,000	100%	1.00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1.900.000	1,880,000	98,95%	1.01
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1.830.000	1,812,000	99,02%	1.00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Dokumen	21 Dokumen	100 %	5.703.000	5,606,000	98,30%	1.02
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	3.339.610.320	3.139.127.630	93,99%	1.06
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Pegawai	18 Pegawai	100%	3.328.832.320	3.128.421.130	91,98%	1.09
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	9.378.000	9.346.500	99,66%	1.00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.400.000	1.360.000	97,14%	1.03

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	184.324.000	172.101.539	94,39%	1.06
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Ruang	18 Ruang	100%	2.222.000	2.222.000	100%	1
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Pegawai 6 Tabung 1 Unit	18 Pegawai 6 Tabung 1 Unit	100%	15.385.000	14.612.000	94,98%	1.05
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis 19.392 lbr	6 Jenis 20.452 Lembar	105,46%	8.746.000	8.716.000	99,66%	1.06
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	100%	4.800.000	4.020.000	83,75%	1.19
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	1 Unit 33 Jenis	1 Unit 31 Jenis	96,97%	25.540.000	24.994.500	97,86%	0.99
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Keg	12 Keg	100%	6.480.000	6.058.000	93,49%	1.07
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 rakor 54 Laporan	18 rakor 32 Laporan	89,63%	121.151.000	111.479.039	92,02%	0.97
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	75.240.000	75.240.000	100%	1
14.1	Pengadaan Mebel	1 Set	1 Set	100%	8.650.000	8.650.000	100%	1
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	3 Jenis	100%	66.590.000	66.590.000	100%	1
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	223.232.003	212.905.402	95,37%	1.05
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Surat/ Dok 37 Jenis	1155 Dok 36 Dok	120,83%	9.560.000	9.381.000	98,13%	1.23
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jasa	4 Jasa	100%	44.400.000	35.178.748	79,23%	1.26
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Orang	7 Orang	100%	169.272.003	168.345.654	99,45%	1.00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	211.481.000	189.858.910	89,77%	1.11
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	11 Unit	11 Unit	100%	150.485.000	136.384.660	90,63%	1.10

	atau Kendaraan Dinas Jabatan							
16.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	100%	37.916.000	30.493.250	80,42%	1.24
16.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 Jenis	100%	23.080.000	22.981.000	99,57%	1.00
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	0	100%	617.928.000	453.006.250	73.31	1.36
2.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	100%	100%	100%	617.928.000	453.006.250	73.31	1.36
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	501.383.000	362.652.000	72,33%	1.38
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan	100%	114.530.000	88.348.250	77,14%	1.29
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokume n	4 Dokume n	100%	2.015.000	2.006.000	99,55%	1.00
3	POGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI	0,69%	0,98%	142,03%	1.218.086.000	1.142.401.950	93.79	1.51

	POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
3.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	100%	100%	100%	1.218.086.000	1.142.401.950	93.79	1.07
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	552.346.000	487.631.950	88,28%	1.13
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Media	2 Media	100%	665.740.000	654.770.000	98,35%	1.02
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	16, 26 % 82, 11 %	16.91% 80.68%	101.125 %	291.905.000	289.934.990	99.32	1.02

	ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	291.905.000	289.934.990	99,32	1.01
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Keg	1 Keg	100%	174.800.000	174.800.000	100%	1
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Lap Monev 3 Hibah 1 Update	1 Lap Monev 3 Hibah 1 Update	100%	117.105.000	115.134.990	98,32%	1.02
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	3,57%	3,59%	100,56%	354.153.000	309.408.500	87,37	1.15
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	354.153.000	309.408.500	87,36%	1.14
5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kampun g	1 Kampun g	100%	34.787.000	33.751.500	97,02%	1.03
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	4 Lokasi 300 Peserta	4 Lokasi 300	100%	68.387.000	64.219.000	93,91%	1.06

	Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi	Peserta Sosialisasi					
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	154.434.000	138.919.000	89,95%	1.11
5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	96.545.000	72.519.000	75,11%	1.33
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	0	100%	386.256.000	325.304.000	84.22%	1.19
6.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%	100%	100%	386.256.000	325.304.000	84.22%	1.19
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	365 hari	365 hari	100%	19.995.000	12.450.000	62,27%	1.60

	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	175.271.000	17.1842.000	81,16%	1.23
6.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	190.990.000	141.012.000	73,83%	1.35

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan secara umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Magelang tahun Anggaran 2022 efisien untuk mendukung tercapainya Indikator Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan tingkat efisien diatas angka 1 untuk mendukung Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 12 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 139.86% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 1 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan rata rata capaian kinerja sebesar 112.31% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 142,03% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103% (kategori Sangat Baik)

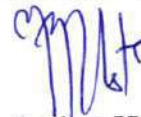
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan kesatuan bangsa dan Politik Kota Magelang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.979.418.323 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.376.431.457, dengan demikian untuk tahun 2022 serapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 91.36% dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.11 .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang.

Kota Magelang, Januari 2023

KEPALA BADAN KEATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG



Drs. Agus Satiyo Hariyadi, M.Si 
NIP. 196701311997031004
Pembina Utama Muda

L A M P I R A N

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. P. Diponegoro No. 61 Telp. (0293) 364873 Fax. (0293) 364708 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

NOMOR : 060/ 07 / 450 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGUATAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 - 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu melakukan percepatan dan penguatan penerapan system akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2022;
- b. bahwa berdasarkan Perpres nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menerapkan Sistem Pemerintahan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penguatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021 – 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGUATAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2021 – 2022.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Penguatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2022 .

KEDUA : Tim Percepatan dan Penguatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran pada dokumen :
 - a. Perjanjian Kinerja 2021
 - b. Penjabaran (Cascading) Perjanjian Kinerja 2021

- c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
 - d. Renja 2022
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja pada;
- a. Monitoring Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
 - b. Monitoring dan Evaluasi Renja
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina SAKIP.

- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/ pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sama dengan pejabat difinitif
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal : September 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KOTA MAGELANG

AGUS SATIYO HARIYADI



6.	Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negei pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG


AGUS SATIYO HARIYADI



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. P. Diponegoro No. 61 Telp. (0293) 364873 Fax. (0293) 364708 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

NOMOR : 060/ 09 / 450 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG NOMOR : 700/ 07/450 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGUATAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 - 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, maka untuk terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan maka Susunan Keanggotaan Percepatan dan Penguatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Penjabaran (Cascading) Perjanjian Kinerja 2021
 - c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
 - d. Renja 2022
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodic terhadap target dan capaian kinerja pada;
- a. Monitoring Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
 - b. Monitoring dan Evaluasi Renja
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina SAKIP.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/ pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sama dengan pejabat difinitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MAGELANG


AGUS SATIYO HARIYADI

Matrik Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
	Terwujudnya stabilitas daerah		Persentase Penurunan Gangguan		Jumlah Gangguan tahun n / jumlah gangguan tahun n-1 dibagi jumlah gangguan tahun n-1 dikali 100	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	
I	Menurunnya Potensi Gangguan		Jumlah Konflik		Jumlah Konflik yang terjadi tahun n	0		0		0		0		0	
			Angka kriminalitas		Jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 10.000.	10,15		10,00		9,84		9,69		9,53	
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

			Persentase kriminalitas yang tertangani		Jumlah kasus kriminal yang tertangani tahun -n dibagi jumlah kasus kriminal tahun -n dikali 100	80,5%		81%		81,50%		82%		82,50%	
			Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	TPB	Jumlah Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0		0		0		0		0	
			Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	TPB	Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0		0		0		0		0	
			Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	TPB	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi total jumlah korban kekerasan dikali 100	100%		100%		100%		100%		100%	
	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik SARA		Jumlah Konflik SARA yang terjadi tahun n	0	268.373.000	0	282.500.000	0	310.000.000	0	337.500.000	0	390.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan		persentase fasilitasi peningkatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	268.37 3.000	100 %	282.50 0.000	100 %	310.00 0.000	100 %	337.500 .000	100 %	390.000. 000
			Jumlah kader Wawasan Kebangsaan			45		45		45		45		45	
			Jumlah Regulasi tentang Pedoman Pembinaan Wasbang			-		1		-		-		-	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara		Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara	6	175.72 6.000	6	189.50 0.000	6	215.00 0.000	6	240.500 .000	6	285.000. 000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)		Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12	89.902.000	12	90.000.000	12	91.000.000	12	92.000.000	12	95.000.000
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)		Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	4	2.745.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibangun dan dipantau		Jumlah Ormas yang dibangun dan dipantau / Jumlah Total Ormas yang ada x 100%	16,26 %	345.920.000	32,52 %	50.300.000	48,78 %	55.340.000	65,04 %	60.390.000	81,30 %	70.430.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		Jumlah Ormas = 246 ormas Aktif = Memiliki Struktur Organisasi, Kesekretariaan, Komunikatif, dan Memiliki Program Kegiatan Jumlah Ormas yang Aktif / Total Ormas yang ada x 100%	82,11 %		83,74 %		85,37 %		86,99 %		88,62 %	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas		persentase Pembinaan Ormas, hibah ormas dan money ormas	100 %	345.920.000	100 %	50.300.000	100 %	55.340.000	100 %	60.390.000	100 %	70.430.000
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dibina		Jumlah pembinaan dan pemantauan ormas	1	45.920.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000
			Jumlah Kebijakan Terkait Ormas		Jumlah Kebijakan Terkait Ormas	-		1		-		-		-	
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monev		Jumlah Laporan Hasil Monev	1	300.000.000	1	300.000	1	340.000	1	390.000	1	430.000
		Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah fasilitasi ormas		Jumlah Ormas yang difasilitasi (hibah)	3		3		3		3		3	
			update Database Ormas		update Database Ormas	1		1		1		1		1	
	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Jumlah Toga, Toma, Pelajar/ Mahasiswa yang mendapatkan pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya / Total seluruh Toga, Toma, Pelajar/ Mahasiswa x 100%	3,57%	217.914.000	5,73%	240.000.000	7,90%	265.000.000	10,06%	290.000.000	12,23%	320.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		persentase pembentukan kampung bebas narkoba, kegiatan P4GN, fasilitasi FKUB, pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	267.914.000	100 %	340.000.000	100 %	365.000.000	100 %	390.000.000	100 %	420.000.000
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)		Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	1 Dokumen	41.869.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN		Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN	4	64.447.000	4	75.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000

		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi		Jumlah Peserta sosialisasi	300		300		300		300		300	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)		Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12	160.118.000	12	211.000.000	12	215.000.000	12	220.000.000	12	225.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)		Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	1	1.480.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000
	4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial		Jumlah kejadian konflik sosial pada tahun (n)	0	462.241.000	0	500.000.000	0	550.000.000	0	600.000.000	0	660.000.000
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>rumusan OPD</i>	<i>Persentase kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan</i>	100 %	462.241.000	100 %	500.000.000	100 %	550.000.000	100 %	600.000.000	100 %	660.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)		Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)	365	47.618.000	365	50.000.000	365	53.000.000	365	55.000.000	365	60.000.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)		Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	12	178.919.000	12	180.000.000	12	197.000.000	12	207.000.000	12	220.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)		Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	12	235.704.000	12	270.000.000	12	300.000.000	12	338.000.000	12	380.000.000
II	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu		Angka partisipasi Politik		Pilpres					80					
					pilgub					80					
					pilwalkot					80					
					pileg					85					
	5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik		Agenda Politik = Sosialisasi, Diskusi, Agenda Partai, dan aktivitas kpolitik yg lain Pemilih Pemula = Usia 17tahun Jumlah Penduduk Usia Pemilih pemula yang mengikuti agenda politik / Jumlah seluruh penduduk usia pemilih pemula x 100%	0,69%	668.352.000	2,17%	1.010.218.000	5,12%	13.055.199.000	5,18%	1.198.199.000	6,50%	688.199.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan pemberdayaan Parpol		Persentase partisipasi partai politik	100 %	668.352.000	100 %	1.010.218.000	100 %	13.055.199.000	100 %	1.198.199.000	100 %	688.199.000
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Politik		Jumlah Rakor Forum Diskusi Politik (Kegiatan)	1	85.753.000	3	186.000.000	3	190.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Media Penyebaran Pendidikan Politik		Jumlah Media	2	582.59 9.000	3	824.21 8.000	5	12.865 .199.0 00	4	1.103.1 99.000	2	588.199. 000
					Jumlah Monev (Penyerahan Hibah dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada)	1	14.400 .000	1	15.000 .000	2	30.000 .000	2	35.000. 000	1	20.000.0 00
					Hibah Banpol	1	568.199. 000	1	568.199. 000	1	568.199 .000	1	568.199.0 00	1	568.199.00 0
					Hibah KPU	0	-	1	241.01 9.000	1	9.034. 000.00 0	1	500.000 .000	0	-
					Hibah Bawaslu	0	-	0	-	1	4.043. 350.00 0	0	-	0	-
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan		Nilai SAKIP OPD			BB		BB		A		A		A	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		Persentase pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	4.104. 232.0 00	10 0%	5.164. 100.0 00	100 %	4.750 .050. 000	100 %	5.551.6 50.000	100 %	5.375.2 50.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	20.400.000	100 %	22.600.000	100 %	35.050.000	100 %	27.650.000	100 %	31.500.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.500.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	8.000.000
			Jumlah Dokumen Review Renstra OPD		Jumlah Dokumen Review Renstra OPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun		Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun	1 Dok um en	2.200. 000	1 Dok um en	2.500. 000	1 Dok um en	3.000. 000	1 Dok um en	3.500.0 00	1 Dok ume n	4.000.00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun		Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dok um en	2.100. 000	1 Dok um en	2.500. 000	1 Dok um en	2.750. 000	1 Dok um en	3.000.0 00	1 Dok ume n	3.500.00 0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dok um en	1.300. 000	1 Dok um en	1.400. 000	1 Dok um en	1.500. 000	1 Dok um en	1.750.0 00	1 Dok ume n	2.000.00 0
			Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20 Lap ora n	5.100. 000	20 Lap ora n	5.200. 000	20 Lap ora n	5.300. 0011 5.619 .0000	20 Lap ora n	5.400.0 00	20 Lap oran	5.500.00 0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan		Persentase ketersediaan Laporan administrasi keuangan	100 %	3.338. 809.00 0	100 %	3.766. 750.00 0	100 %	4.017. 500.00 0	100 %	4.268.2 50.000	100 %	4.519.00 0.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun		Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	18 Ora ng	3.322. 646.00 0	20 Ora ng	3.750. 000.00 0	22 Ora ng	4.000. 000.00 0	22 Ora ng	4.250.0 00.000	22 Ora ng	4.500.00 0.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun		Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun	12 Dok um en	13.559 .000	12 Dok um en	14.000 .000	12 Dok um en	14.500 .000	12 Dok um en	15.000. 000	12 Dok ume n	15.500.0 00
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD	3 Dokumen	2.604.000	3 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.250.000	3 Dokumen	3.500.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi umum PD		Persentase ketersediaan Laporan administrasi umum	100 %	218.043.000	100 %	223.250.000	100 %	234.500.000	100 %	243.250.000	100 %	253.250.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan		Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan	18 Ruang	2.222.000	24 Ruang	3.000.000	24 Ruang	3.500.000	24 Ruang	3.750.000	24 Ruang	4.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian		Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	18 Orang	12.373.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	14.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
			Jumlah Genset yang disediakan BBM		Jumlah Genset yang disediakan BBM	1 Unit	3.864.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.500.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000
			Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg		Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg	6 Tabung	950.000	9 Tabung	1.500.000	12 Tabung	2.000.000	12 Tabung	2.250.000	12 Tabung	2.500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		Jumlah barang cetakan	6 Jenis	7.110.000	7 Jenis	7.500.000	8 Jenis	7.750.000	8 Jenis	8.000.000	8 Jenis	8.000.000
			Jumlah Dokumen yang digandakan		Jumlah Dokumen yang digandakan	19.392 Lembar	4.848.000	20.000 Lembar	5.000.000	21.000 Lembar	5.250.000	22.000 Lembar	5.500.000	23.000 Lembar	5.750.000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan		Jumlah jenis bahan bacaan	2 jeni s	3.000. 000	2 jeni s	3.250. 000	2 jeni s	3.500. 000	2 jeni s	3.750.0 00	2 jeni s	4.000.00 0
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	14.859 .000	1 Unit	15.000 .000	1 Unit	20.000 .000	1 Unit	22.000. 000	1 Unit	25.000.0 00
			Jumlah alat dan bahan pembersih		Jumlah alat dan bahan pembersih	33 Jeni s	10.681 .000	33 Jeni s	11.000 .000	33 Jeni s	12.000 .000	33 Jeni s	13.000. 000	33 Jeni s	14.000.0 00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Kali	6.500. 000	12 Kali	7.000. 000	12 Kali	7.500. 000	12 Kali	8.000.0 00	12 Kali	8.000.00 0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	10.400 .000	16 Kali	11.000 .000	16 Kali	11.500 .000	18 Kali	12.000. 000	18 Kali	12.000.0 00
			Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	54 Kali	141.23 6.000	54 Kali	142.00 0.000	54 Kali	143.00 0.000	54 Kali	145.000 .000	54 Kali	150.000. 000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	100.46 7.000	100 %	705.00 0.000	100 %	-	100 %	30.000. 000	100 %	72.000.0 00
		Pengadaan Kendaraan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 4		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 4	0 Unit	-	1 Unit	400.00 0.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan		jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan	4 Jenis	44.400 .000	4 Jenis	46.000 .000	4 Jenis	48.000 .000	4 Jenis	50.000. 000	4 Jenis	50.000.0 00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun		Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	7 Orang	163.81 2.000	7 Orang	176.00 0.000	7 Orang	183.50 0.000	7 Orang	190.500 .000	7 Orang	198.000. 000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	207.30 1.000	100 %	212.50 0.000	100 %	218.50 0.000	100 %	728.500 .000	100 %	237.500. 000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11 Unit	139.18 5.000	11 Unit	140.00 0.000	14 Unit	143.00 0.000	14 Unit	147.000 .000	14 Unit	150.000. 000
			Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya		Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	11 Unit	11.300 .000	11 Unit	12.000 .000	11 Unit	12.000 .000	14 Unit	16.000. 000	14 Unit	18.000.0 00
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	3 Unit	34.676.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	37.000.000	3 Unit	38.000.000	3 Unit	40.000.000
			Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya		Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	3 Unit	3.240.000	3 Unit	3.500.000	3 Unit	3.500.000	3 Unit	3.500.000	3 Unit	3.500.000
		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara		Jumlah mebelair yang dipelihara	0 Jenis	-	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.500.000	1 Jenis	3.000.000	1 Jenis	4.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	18.900.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	20.500.000	6 Jenis	21.000.000	6 Jenis	22.000.000
			Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain		Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	500.000.000	0 Paket	-



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

Jl. P. Diponegoro No. 61 Telp. (0293) 364873 Fax. (0293) 364708 Magelang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG
NOMOR : 050/08/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021–2026
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang
Pada Tanggal : 1 November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAGELANG



AGUS SATIYO HARIYADI

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAGELANG



AGUS SATIYO HARIYADI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Satiyo Hariyadi

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Muchamad Nur Aziz

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2022



Muchamad Nur Aziz



Agus Satiyo Hariyadi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Jumlah Konflik	0
		Angka Kriminalitas	10,15
		Persentase Kriminalitas yang tertangani	80,5%
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Persentase Penurunan Gangguan	2,0%
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik (Pilpres)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilgub)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilwalkot)	0
		Angka partisipasi Politik (Pileg)	0
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	72-75

Program (5)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Anggaran (6)
Rp 215.287.000 |
| 2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Rp 950.256.000 |
| 3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Rp 114.590.000 |
| 4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya | Rp 319.153.000 |
| 5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Rp 350.133.000 |
| 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 4.387.873.000 |

Magelang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Muchamad Nur Aziz

Pihak Pertama,

Agus Satrio Hariyadi



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Satiyo Hariyadi

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Muchamad Nur Aziz

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Oktober 2022



Pihak Kedua

Muchamad Nur Aziz



Pihak Pertama

Agus Satiyo Hariyadi

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Jumlah Konflik	0
		Angka Kriminalitas	10,15
		Persentase Kriminalitas yang tertangani	80,5%
2	Menurunnya Potensi Gangguan	Persentase Penurunan Gangguan	2,0%
3	Meningkatnya partisipasi Politik Dalam Pemilu	Angka partisipasi Politik (Pilpres)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilgub)	0
		Angka partisipasi Politik (Pilwalkot)	0
		Angka partisipasi Politik (Pileg)	0
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai SAKIP OPD	72-75

Program (5)	Anggaran (6)
1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp 617.928.000
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp 1.218.086.000
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp 291.905.000
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp 354.153.000
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp 386.256.000
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.111.090.323



Pihak Kedua,

Muhammad Nur Aziz



Magelang, Oktober 2022

Pihak Pertama,

Agus Satiyo Hariyadi



KOTA MAGELANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
- b. NIP : 196701311997031004
- c. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Magelang, tanggal 03 Januari 2022

Disahkan oleh,
PPKD

Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.
NIP: 196302051985031016

SUSILOWATI, SE, MT, MSc.
NIP: 197211011998032008



KOTA MAGELANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
b. NIP : 196701311997031004
c. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Magelang, tanggal 03 Januari 2022
Pengguna Anggaran

SUSILOWATI, SE, MT, MSc.
NIP: 197211011998032008

Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
NIP: 196701311997031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Magelang Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.28.0000/001/2022					
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan			Rp0	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp6.337.292.000	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp3.739.348.000	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp1.899.745.000	
5 1 05	Belanja Hibah			Rp698.199.000	
	Jumlah Belanja			Rp6.337.292.000	
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp6.337.292.000)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0	
	Pembiayaan Neto			Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Magelang, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik <u>Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si</u> NIP: 196701311997031004 Mengesahkan, PPKD <u>SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc.</u> NIP: 197211011998032008	
Januari	Rp0	Januari	Rp417.883.870		
Februari	Rp0	Februari	Rp503.161.970		
Maret	Rp0	Maret	Rp472.790.220		
April	Rp0	April	Rp561.132.470		
Mei	Rp0	Mei	Rp750.455.835		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.106.999.470		
Juli	Rp0	Juli	Rp459.598.470		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp460.845.970		
September	Rp0	September	Rp439.810.720		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp446.135.470		
November	Rp0	November	Rp360.249.595		
Desember	Rp0	Desember	Rp358.227.940		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.337.292.000		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD		
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD		
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD		



KOTA MAGELANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
b. NIP : 196701311997031004
c. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Drs. JOKO RUDYONO, M.M.
NIP: 196302051985031016

Magelang, tanggal 17 Oktober 2022

Disahkan oleh,
PPKD


SUSI LOWATI, SE, MT, MSc.
NIP: 197211011998032008



KOTA MAGELANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
b. NIP : 196701311997031004
c. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

SUSILOWATI, SE, MT, MSc.
NIP: 197211011998032008

Magelang, tanggal 17 Oktober 2022
Pengguna Anggaran

Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
NIP: 196701311997031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD
Kota Magelang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.28.0000/001/2022				
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp6.337.292.000	Rp6.864.178.323	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp3.739.848.000	Rp3.328.832.320	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.899.745.000	Rp2.742.347.003	
5 1 05	Belanja Hibah	Rp698.199.000	Rp792.999.000	
5 2	BELANJA MODAL	Rp0	Rp115.240.000	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0	Rp75.240.000	
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp40.000.000	
	Jumlah Belanja	Rp6.337.292.000	Rp6.979.418.323	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp6.137.292.000)	(Rp6.979.418.323)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Magelang, tanggal 17 Oktober 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  <u>Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si</u> NIP: 196701311997031004 Mengesahkan, PPKD  <u>SUSI LOWATI, SE, MT, MSc</u> NIP: 197211011998032008
Januari	Rp0	Januari	Rp368.179.661	
Februari	Rp0	Februari	Rp418.023.761	
Maret	Rp0	Maret	Rp425.455.511	
April	Rp0	April	Rp534.453.261	
Mei	Rp0	Mei	Rp615.181.999	
Juni	Rp0	Juni	Rp1.342.124.426	
Juli	Rp0	Juli	Rp375.973.261	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp379.047.261	
September	Rp0	September	Rp393.416.511	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp587.414.761	
November	Rp0	November	Rp1.183.655.389	
Desember	Rp0	Desember	Rp356.492.521	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.979.418.323	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	